

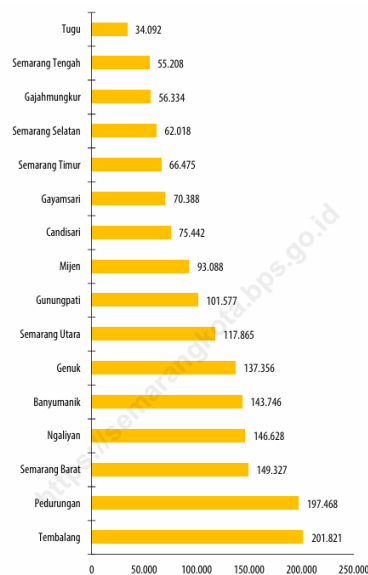
## BAB II

### Gambaran umum dan Profil Pekerja Kota Semarang

#### 2.1 Gambaran Penduduk Kota Semarang

Kota Semarang memiliki jumlah penduduk 1.694.743,00 Jiwa. Dan terbagi menjadi 16 wilayah Kecamatan yaitu, Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajah Mungkur, Semarang Selatan, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan dan 177 Kelurahan. Jumlah penduduk Kota Semarang setiap kecamatannya memiliki penduduk di atas 30.000 jiwa penduduk dan paling banyak sebanyak 200.000 jiwa penduduk.

**Gambar 2. 1 Data Penduduk Kota Semarang**



Sumber: Laporan Badan Pusat Statistika (2024)

Dari data ini menunjukkan bahwa penduduk terendah terdapat di kecamatan Tugu dan paling padat penduduk adalah di kecamatan Tembalang, mengingat hal ini Kota

Semarang merupakan kota metropolitan yang mana banyak imigran yang berdatangan, dengan memiliki beberapa universitas, pabrik atau lapangan pekerjaan, dan beberapa komoditas lainnya yang menarik para imigran berdatangan dan sangat mungkin jika kepadatan penduduk Kota Semarang setiap tahunnya bertambah.

### **2.1.1 Kondisi Sosiologis**

#### **a. Kondisi Pendidikan Penduduk**

Pendidikan pastinya menjadi fokus utama dari pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber daya yang unggul di daerah nya. Maka dari itu sering kali pemerintah daerah memiliki program program khusus guna pengembangan di sektor pendidikan. Sekolah menjadi wadah bagi para putra dan putri terbaik bangsa untuk mengembangkan potensinya bagi nusa dan bangsa di era sekarang. Semarang sebagai kota besar tentu memiliki fasilitas pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu pendidikan (sekolah) yang banyak.

Melihat data sekolah yang ada di Kota Semarang diatas menandakan bahwa Pendidikan di Kota Semarang memikat perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia. Sekolah sekolah di Kota Semarang hadir untuk memberikan akses pendidikan yang luas bagi Masyarakat khususnya Kota Semarang. Karena sejatinya Pendidikan adalah fondasi dari kemajuan ekonomi dan social bangsa.

**Tabel 2. 1 Sosiologis Kota Semarang**

<b>Kelurahan</b>	<b>SD</b>	<b>SMP</b>	<b>SMA</b>	<b>SMK</b>	<b>Perguruan Tinggi</b>
Mijen	14	11	5	3	2
Gunung Pati	16	12	7	5	1
Banyumanik	11	9	8	3	1
Gajahmungkur	7	3	2	4	5
Semarang Selatan	10	7	5	5	4
Candisari	7	5	2	3	4
Tembalang	12	8	5	2	3
Pedurungan	12	12	8	5	5
Genuk	12	8	6	3	1
Gayamsari	7	5	3	4	3
Semarang Timur	10	7	1	6	4
Semarang Utara	9	7	2	3	1
Semarang Tengah	14	12	7	7	5
Semarang Barat	16	12	8	6	7
Tugu	7	4	3	1	1
Ngaliyan	10	7	5	3	2

Sumber: Laporan Badan Pusat Statistika Kota Semarang Tahun 2024

Melihat tabel 1.3 menunjukkan bahwa fasilitas sekolah di Kota Semarang paling banyak adalah jenjang Pendidikan SD mengingat Pendidikan usia dini penting dalam membuat pondasi pengetahuan kedepannya. Dan melihat tabelpula perguruan tinggi di Kota Semarang

juga terbilang banyak fasilitasnya, mengingat terdapat perguruan tinggi yang terkenal di dunia nasional dan internasional.

**Tabel 2. 2 Persentase Pekerjaan**

Angkatan Kerja			
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
SD	140.820	3.850	97,34
SMP	104.293	3.574	96,69
SMA	397.544	33.445	92,24
Perguruan Tinggi	248.840	14.252	94,58

Sumber: Laporan Badan Pusat Statistika Kota Semarang Tahun 2024

Jika membahas mengenai jenjang pendidikan, tabel di atas menunjukkan bahwa pekerja Kota Semarang banyak yang lulusan SMA/SMK yang bekerja sebanyak 397.544 jiwa, lalu disusul dengan jenjang pendidikan perguruan tinggi sebanyak 248.840 jiwa

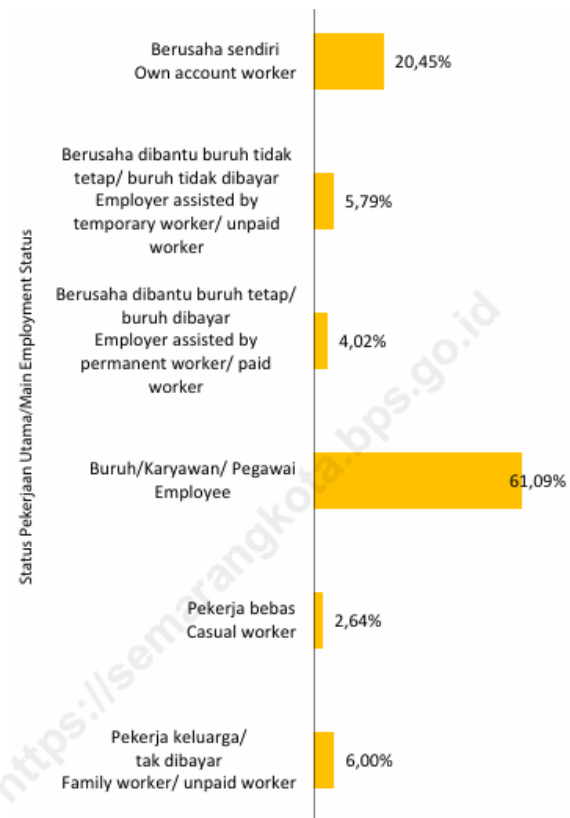
**b. Kondisi Pekerjaan Penduduk Kota Semarang**

Pekerjaan menjadi salah satu hal yang penting bagi kemajuan suatu daerah karena pekerjaan menjadi penopang atau penggerak utama dalam bidang ekonomi dan sosial. Dari pekerjaan pula masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari harinya dan selain itu pekerjaan memegang peran langsung dalam perputaran ekonomi daerah. Ketika rakyat memiliki pekerjaan maka hal ini akan berimplikasi pada kestabilan sosial, dan peran pemerintah daerah yaitu menyediakan lapangan pekerjaan yang luas karena dapat mengurangi tingkat pengangguran dan

kemiskinan dapat ditekan. Tidak hanya itu peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilihat dari seberapa banyaknya masyarakat yang bekerja dan produktif, pendapatan daerah dapat di terima melalui pajak, retribusi yang diterapkan hal ini dapat digunakan untuk membangun daerah yang berkelanjutan. Bekerja yaitu suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan dari segi prekonomian serta dimana biasanya waktu kerja paling sedikit 1 jam perharinya atau kumulatifnya dapat bekerja satu jam dalam seminggu terakhir (termasuk pula pekerja keluarga tanpa gaji dimana seseorang yang membantu dalam sebuah usaha).

Diketahui umur produktif kerja di Indonesia adalah berumur 15 keatas. Menurut Badan Pusat Statistika Kota Semarang, tahun 2024 usia kerja produktif di Kota Semarang berjumlah sebanyak 946.618 jiwa sementara itu yang tidak kedalam angkatan kerja sebanyak 407.975 jiwa. Dan yang lebih mirisnya terdapat 94,18% yang bekerja dan sisanya merupakan pengangguran terbuka. Dan yang masuk ke dalam pengangguran terbuka mayoritas adalah penduduk dengan pendidikan tertinggi SMA yaitu sebesar 60,67 persen dari keseluruhan yang menganggur

**Gambar 2. 1 Status Pekerjaan Utama Penduduk Kota Semarang**



Sumber: Laporan Badan Pusat Statistika Kota Semarang Tahun 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa, masyarakat kota Semarang mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh yakni sebanyak 61,09% usia produktif penduduk kota Semarang buruh menjadi pekerjaan utama dalam mencari upah, dan disusul oleh berusaha sendiri sebanyak 20,45%, dan yang ketika berkaitan dengan buruh pula ada di urutan ke empat yaitu

sebanyak 5,79% merupakan berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap / buruh tidak di bayar.

Selain itu menurut badan pusat statistika Kota Semarang 2024 menyatakan bahwa sebanyak 70,17% penduduk Kota Semarang bekerja pada sektor jasa, disusul 27,64% pada sektor industri, dan yang terakhir 2,20% pada sektor pertanian.<sup>23</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan tittle dari Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi sehingga jasa dan distribusi menjadi dominan lapangan kerja yang sangat kuat, serta mengartikan bahwa Semarang sebagai kota industri tidak kalah dengan wilayah industri di sebelah nya seperti Demak, Kendal dan Batang, bahwa terlihat semarang tetap menjadi kota dengan basis ekonomi industri yang kuat.

**Tabel 2. 3 Tabel Gaji Buruh**

<b>Tahun</b>	<b>UMK Kota Semarang</b>
2025	Rp. 3.454.827
2024	Rp. 3.243.969
2023	Rp. 3.060.348
2022	Rp. 2.835.021
2021	Rp. 2.810.025

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2026

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Upah Minimum Kota Semarang mengalami kenaikan disetiap tahun nya, dan terlihat disetiap

<sup>23</sup> Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2024

tahunnya kenaikan upah termasuk konsisten naik sekitar Rp.200.000 sehingga pada tahun 2026 upah pekerja mencapai di angka Rp. 3.701.709. Meskipun begitu ini adalah angka yang kecil apalagi teruntuk Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah, dibandingkan dengan kota-kota ibu kota provinsi yang lain seperti Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat mencapai Rp. 4.482.914 dan Surabaya ibu kota Provinsi Jawa Timur sudah mencapai di angka Rp. 4.961.753,00. Perbedaan yang cukup jauh ini membuktikan adanya disparitas pengupahan masing-masing daerah, dengan melihat perbedaan tingkat produktivitas, bidang industri dan kebijakan ekonomi masing-masing daerah. Maka dari itu Kota Semarang untuk mencapai komponen hidup layak (KHL) kota Semarang masih tertinggal jauh dengan kota-kota yang lain.

## **2.2 Sejarah Gerakan Buruh di Kota Semarang**

Sejarah lahirnya serikat buruh di Kota Semarang tidak lepas dari masa kolonial jaman dahulu. Pada tahun 1906 tanggal 21 Februari, Semarang disahkan sebagai Ko-Tapraja dimana di gerakan oleh 23 dewan perwakilan daerah (gemeenteraad) terdiri dari 5 orang pribumi, 3 orang Timur dan 15 orang Eropa. Sejak jaman kolonial dulu Semarang sudah menjadi wisata utama yang di datangi oleh para Elit Eropa ataupun Tionghoa dalam menggerakkan usahanya. Selain itu Semarang memiliki fasilitas yang mendukung yaitu pelabuhan yang menjadi keluar masuknya ekspor dan impor perdagangan gula di Pulau Jawa. Hal ini menjadi langkah awal dari terbentuknya serikat buruh, yang mana keadaan pada masa kolonial memberikan dukungan dalam meningkatnya kualitas buruh.

Awalnya pada Februari 1918, Semarang mengalami kenaikan harga beras mencapai 14 f (14 Gulden), naiknya harga beras ini membuat rakyat menjerit karena membebani perekonomian rakyat. Sehingga golongan buruh dan petani yang merupakan kaum proletar menjadi resah dengan kenaikan beras ini. Sehingga serekat buruh mengadakan pertemuan dengan membawa pembahasan kenaikan harga bahan pokok ini seperti beras dan permasalahan yang sedang mereka alami dengan membawa tindakan pemogokan kerja guna menuntut hak mereka.

Lahirnya Serekat buruh di Kota Semarang berlatarbelakang dari rasa ketidakadilan yang didapatkan oleh kaum buruh pada saat itu. Melihat Kota Semarang adalah Kota yang liberal menjadikan serekat buruh berkembang dengan pesat dan aktif salah satunya ditunjukkan dengan mengadakan pertemuan secara rutin. Serekat buruh memiliki tiga hal pokok yang menjadi tujuan mereka yaitu, pertama, membuat kesejahteraan buruh meningkat dan membuat upah buruh agar dapat di tingkatkan. Kedua, Agar dapat menjaga agar kaum buruh tidak bekerja di luar dari batas kemampuan para buruh, sehingga sisi kemanusiaan tetap di pandang. Ketiga, nasib kaum buruh tidak di pandang sesukanya oleh majikan.

Serekat buruh semakin berkembang sejak datangnya pada komunis seperti Sneevliet dan Semaoen yang memiliki pemikiran luas kepada serekat buruh. Serekat buruh yang terkenal pada masa itu adalah Serekat Buruh Kereta Api dan Trem atau Vereniging van Spoor, en Tramweg Personeel (VSTP), Sarekat Pegawai Pelabuhan dan Lautan (SPPL), Perserikatan Pergerakan Kaoem Boeroeh (PPKB), Sarekat Buruh Pelabuhan Semarang (Havenarbeidsbond), Serikat Pegawai Laut Indonesia (SPLI), Perkumpulan Kaum Buruh Tionghoa. Pergerakan buruh

di Semarang mengalami perkembangan yang signifikan. Sarekat Buruh Kereta Api (VSTP), Perserikatan Pegawai Hoetan Boemi Poetra Wono-Tamtomo, Sarekat Buruh Tjidak (SBT), Sarekat Postel (Post, Telegraaf, en Telefoondienst), dan Kaum Buruh Sarekat Islam Semarang, Sarekat Perawat Ru-mah Sakit Indonesia (SPRI). Di antara serekat buruh yang ada di Kota Semarang pada masa itu yang paling banyak anggotanya adalah Sarekat Buruh Kereta Api (VSTP) dengan memiliki anggota sebanyak 6000 orang pada tahun 1919. Tokoh yang memiliki power dan dampak bagi serekat buruh Semarang adalah Semaoen pada kala itu ia dianggap sebagai tokoh revolusioner dan diangkat sebagai ketua dari VSTP. Sampai dimana terjadinya tragedi PKI menyebabkan kemunduran bagi serekat buruh dimana pada Agustus 1923 para pembesar serekat buruh Semarang seperti Semaoen pergi ke Belanda dan tidak kembali lebih 30 tahun.

### **2.2.1 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah**

Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 yang menjadi awal dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan peristiwa ini menjadi awal terbentuknya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Pada saat Orde Baru, pemerintah mengeluarkan regulasi dan sisten organisasi Tunggal untuk serikat buruh yang mana Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang hanya diakui dan memiliki nama sebelumnya yaitu Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Di bawah kendali pemerintah memiliki arti dimana pemilihan ketua, mengendalikan tuntutan kenaikan upah dan pembatasan partisipasi buruh berada di tangan dan kendali pemerintah.

Sehingga hal ini berarti buruh tidak memiliki kendali penuh dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya.

Sampai akhirnya ketika keluar Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja dan diteruskan pada Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 oleh Presiden B.J Habibie terkait dengan Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Hal ini membawa dampak yang besar kepada SPSI dimana mendapatkan dukungan dari *International Confederation of Free Trade Unions* (ICFTU) yang mana sebelumnya *International Confederation of Free Trade Unions* (ICFTU) menyimpan curiga kepada SPSI menjadi alat bagi pemerintah.

Sehingga pada tahun 2000-2003 terdapat berbagai pertemuan pertemuan yang memiliki tujuan sebagai upaya penyatuan hingga di bentuknya tim panitia. Pertemuan ini sudah berlangsung selama tiga bulan akan tetapi dari hal ini tidak membuahkan hasil yang diharapkan, sampai akhirnya membentuk Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diketuai oleh Sjaeful DP dari Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSP KEP). Melalui KSPI ini membuahkan hasil dengan merumuskan dasar penyatuan dan mempersiapkan konvensi pendirian konfederasi baru dan pada tanggal 1 Februari 2003 bertempat di Wisma Kinasih, Bogor, lahirlah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan formatur Rustam Aksam dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) sebagai Presiden pertama Rindo dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai Sekretaris Jenderal. KSPI adahingga saat ini menjadi serekat

buruh terbesar di Indonesia yang terus menyuarkan suara dan kepentingan buruh.

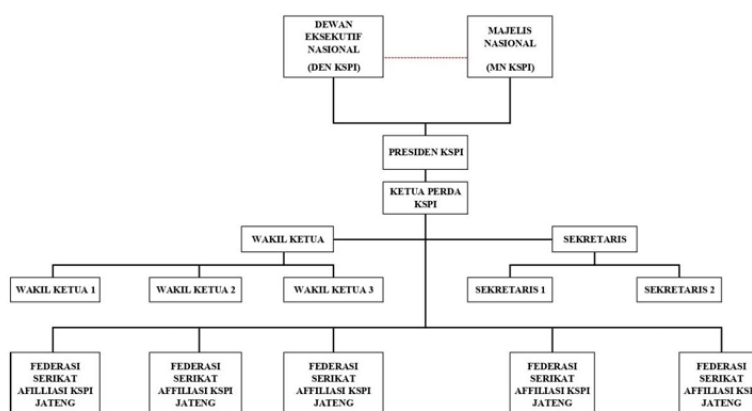
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merupakan Organisasi Serikat Pekerja/ Buruh yang memiliki tujuan dan misi untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh di Indonesia. KSPI memiliki berbagai affiliati Federasi Serikat Pekerja lainnya, yaitu :

1. FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia)
2. SPN (Serikat Pekerja Nasional)
3. FSPKEP (Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum)
4. FSP Farkes Ref (Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan 59 Reformasi)
5. FSP ISSI (Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Seluruh Indonesia)
6. FSP PAR Ref (Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi)
7. FSP PPMI (Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Indonesia)
8. ASPEK Indonesia (Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia)
9. FPTHSI (Forum Pendidik, Tenaga Honorer Swasta Indonesia)
10. SBPI (Serikat Buruh Perjuangan Indonesia)
11. FSP Farkes KSPI (Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPI)
12. FSP ASPEK Indonesia (Federasi Serikat Pekerja ASPEK

Indonesia)

Untuk saat ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terdapat di beberapa masing provinsi di Indonesia, khususnya Jawa Tengah da KSPI Jawa Tengah saat ini mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KSPI Pusat dan struktur dari organisasi per-provinsi di bentuk oleh masing masing tingkat provinsi dan bersifat koordinasi (*stuffing*). Dengan hal itu maka KSPI di tingkat provinsi memiliki tupoksi menjalankan fungsi pelaksanaan, koordinasi dan penerusan kebijakan yang di buat oleh KSPI pusat. Sejak berdirinya KSPI Jawa Tengah dengan jarak satu hari yaitu tanggal 2 Februari 2003, KSPI Jawa Tengah memiliki Perda KSPI (Perwakilan Daerah KSPI Jawa Tengah). Dan berbicara mengenai kepengurusan, KSPI di masing masing provinsi mengikuti aturan dari KSPI Pusat yaitu masa jabatan kepengurusan lima tahun dengan menyesuaikan periode kepengurusan se-nasional.

**Gambar 2. 2**  
**Struktur Organisasi KSPI Jawa Tengah**



Sumber: DPW KSPI Jawa Tengah

**Tabel 2. 4**  
**Pengurus KSPI Jawa Tengah Periode 2022-2027**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama Pengurus</b>	<b>Affiliasi</b>
Ketua Perda KSPI Jateng	Aulia Hakim, SH	FSPMI
Wakil Ketua I	Sutarjo	SPN
Wakil Ketua II	Joko	FSP Farkes
Sekretaris	Akhmad Zaenudin	FSP KEP
Wakil Sekretaris I	Yuliadi	FSP ISSI
Wakil Sekretaris II	Makiran	ASPEK Indonesia
Wakil Sekretaris	Sokardi S	FSPMI

Sumber: DPW KSPI Jawa Tengah

KSPI memiliki Visi Misi

#### **Visi KSPI**

Wadah berhimpun federasi-federasi serikat pekerja dalam berjuang mewujudkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan melalui/menuju Negara Kesejahteraan “*Welfare State*” berbasis Klas Pekerja (*We are The Working class*) dengan alat perjuangan sosial, ekonomi dan politik dengan membangun Partai Buruh sebagai alat perjuangan klas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila.

#### **Misi KSPI**

1. Mewujudkan lapangan kerja yang layak.
2. Mewujudkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja dan

keluarganya.

3. Mewujudkan Jaminan Sosial yang layak dan berkeadilan.
4. Optimalisasi pendapatan dan fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan serta sumber pembiayaan program-program welfare state.
5. Merealisasikan Hubungan Industrial yang berkeadilan, bermartabat, dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan pendidikan gratis hingga SLTA dan pendidikan murah dan terjangkau di tingkat perguruan tinggi yang berkualitas bagi seluruh rakyat.
7. Menjadikan Koperasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD sebagai sumber penguatan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan.
8. Memastikan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
9. Mewujudkan lingkungan industri yang ramah Lingkungan Hidup, Penegakan Hak Asasi Manusia.
10. Mengkonsolidasi suara anggota dan suara buruh/pekerja Indonesia agar secara ekonomi dan politik dapat ikut menentukan arah kebijakan negara dan kesejahteraan buruh/pekerja dan rakyat.
11. Berpartisipasi aktif dan berperan serta dalam Pembangunan Nasional dan peningkatan peran organisasi dalam bidang ekonomi, sosial politik, budaya dan hukum.

12. Menjadikan KSPI berperan aktif dan mendukung Partai Buruh untuk mewujudkan negara sejahtera "welfare state", dengan mengikuti kode etik politik organisasi.

Memiliki pula 10 Strategi Perjuangan Organisasi, sebagai berikut:

1. Ideologisasi dan Kaderisasi
2. Kemandirian organisasi melalui Iuran anggota
3. Penambahan jumlah anggota
4. Metode perjuangan berbasis Konsep-Lobi-Aksi-Politik/K-L-A-P
5. Perluasan dan penguatan jaringan solidaritas nasional dan internasional
6. Advokasi yang cepat dan tepat guna
7. Media dan propaganda perjuangan
8. Rapat umum, unjuk rasa dan pemogokan
9. Penguatan peran dan partisipasi Pekerja Muda dan pekerja Perempuan
10. Penciptaan lapangan kerja yang dikelola oleh negara (bukan swastanisasi).
11. Peningkatan pendapatan pajak dan tax Ratio untuk pembiayaan program jaminan sosial<sup>24</sup>

### **2.2.2 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa**

#### **Tengah**

Awal mula FSPMI hadir pada saat orde baru Mei 1998 yang artinya tepat jatuhnya rezim Soeharto yang mana reformasi di bidang ketenagakerjaa mulai meningkat. Perubahan ini di tumpu leh ratifikasi

---

<sup>24</sup> Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). 2024  
<https://www.kspicitu.org/>

Konveksi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi oleh Pemerintah Indonesia. Hal berikut menjadi langkah awal terbentuknya serikat independen karena sejarah menulis bahwa bertahun tahun ketenagakerjaan terikat dengan naungan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dengan dikendalikan pemerintah. Hingga pada akhirnya pada tahun 1998 reformasi melahirkan SPSI Reformasi yang mana merupakan pecahan dari SPSI lama dan 14 federasi yang lain.

Pada tanggal 4-7 Februari 1999 bertempat di Garut, Jawa Barat Awal mula terbentuknya FSPMI yaitu dari 14 federasi yang ada, terdapat satu yang paling vocal yaitu Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (SP-LEM) yang di bawah kendali SPSI Reformasi berubah menjadi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). FSPMI diawali pada kepemimpinan Drs. H. Thamrin Mosii dan almarhum R. H. Endang Thamrin merupakan Sekretaris Jenderal.

Transformasi dilanjutkan pada tanggal 28 Agustus sampai 1 September 2001 terjadi Kongres kedua SPMI bertempat di Lembang Bandung dan organisasi berkembang menjadi Federasi dengan nama FSPMI dengan tujuan menjadi wadah serikat anggota seperti Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAI-FSPMI), Serikat Pekerja Alat Mesin dan Komponen (SPAMK), Serikat Pekerja Pelayaran dan Jasa Maritim (SPPJM), Serikat Pekerja Elektronik dan Elektrik (SPEE), Serikat Pekerja Logam (SPL) dan Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPDI). Pada

periode ini Ir. H. Said Iqbal yang menjadi Sekretaris Jenderal memiliki pengaruh penting pada perluasan perjuangan FSPMI salah satunya isu internal pabrik ke sosial. Puncaknya hubungan yang terjadi antara FSPMI dan SPN membentuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

FSPMI hadir dari bentuk semangat perjuangan buruh guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan untuk para buruh, dan FSPMI hadir sebagai wadah perjuangan buruh untuk tujuan upah layak, hak yang adil dan kondisi kerja yang manusiawi. FSPMI berdiri dengan Visi dan Misi, sebagai berikut:

#### **Visi Organisasi**

Membangun Serikat Pekerja yang Demokratis, Bebas, Representatif, Independen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial

#### **Misi Organisasi**

1. Peningkatan Upah Minimum Penolakan UU Cipta Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pendampingan Kasus Ketenagakerjaan
2. Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial Penguatan Aliansi Serikat Pekerja Partisipasi Politik Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Perjuangan Fleksibilitas Jam Kerja untuk Buruh Perempuan Kampanye Anti Sistem Outsourcing<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). 2025  
<https://fspmi.or.id/>

### **2.2.3 Federasi Serikat Pekerja Independen (FSPI) Jawa Tengah**

Federasi Serikat Pekerja Independen (FSPI) Jawa Tengah adalah salah satu organisasi serikat buruh di Jawa Tengah yang menjadi perwadahan dari pekerja khususnya di Jawa Tengah dalam mencapai haknya. Makna kata Independen dari Federasi Serikat Pekerja Independen yaitu menunjukkan bahwa seluruh anggota ataupun organisasi ini tidak memiliki afiliasi dengan partai politik apapun bahkan sekecil menggunakan atribut partai FSPI menghindarinya. Keterlibatan FSPI dalam mengawal hak buruh terlihat pada saat Ketika FSPI mengawal pula kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan buruh seperti, Upah Minimum Kota (UMK), atau bahkan Kebijakan Tapera, segala hal yang berkaitan dengan jaminan social bagi buruh. Tidak hanya itu FSPI menjadi garda terdepan bagi buruh khususnya anggotanya yang sedang terjerat dalam permasalahan kerja seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ataupun pesangon.<sup>26</sup>

### **2.2.4 Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Jawa Tengah**

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara merupakan salah satu serikat pekerja yang ada di Jawa Tengah dimana hadir dalam lingkup masyarakat untuk menjawab keterbutuhan kaum pekerja/buruh dalam membela harkat dan martabat kaum buruh serta melindungi hak daripada buruh dengan menegakkan demokrasi, hukum dan keadilan social guna mencapai cita cita kemerdekaan Indonesia. Dalam pembentukannya KSPN tentu berlandaskan

---

<sup>26</sup> Federasi Serikat Pekerja Independen. 2015  
<https://fspindependen.wordpress.com/page/2/>

pada Pancasila, KSPN dibentuk pada tanggal 1 Juni 2022 yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila, dibentuk di Hotel Grasia Semarang dengan di bentuk oleh tujuh federasi serikat pekerja/buruh pada tingkatan nasional, yaitu :

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN);
2. Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI);
3. Federasi Serikat Pekerja Indonesia Bersatu (FSPIB);
4. Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI);
5. Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Pembaharuan (FSPSI Pembaharuan);
6. Federasi Serikat Buruh Bandung (FSBB);
7. Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia (FSPOI).

Dan perkembangan yang terjadi KSPN menerima bergabungnya Federasi Serikat Pekerja seperti, Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI) dan Federasi Serikat Buruh Nasional Indonesia (FSBNI). Dengan hal ini KSPN membulatkan tekad dalam berkolaborasi dengan menguatkan potensi dan upaya dalam membela nasib hak para pekerja di Indonesia.

Slogan KSPN sendiri yaitu;

KSPN BISA...!!!

NUSANTARA JAYA...!!!

PEKERJA SEJAHTERA...!!!<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN). 2021  
<https://www.kspncenter.com/>